

PERUBAHAN 2025
RENJA
RENCANA KERJA



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS SOSIAL

Jl. Usman Ambon No. 25 Kota Pangkalpinang || Telp. [0717] 421896 / 421897
www.dinsos.pangkalpinangkota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan mengacu pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2025.

Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan.

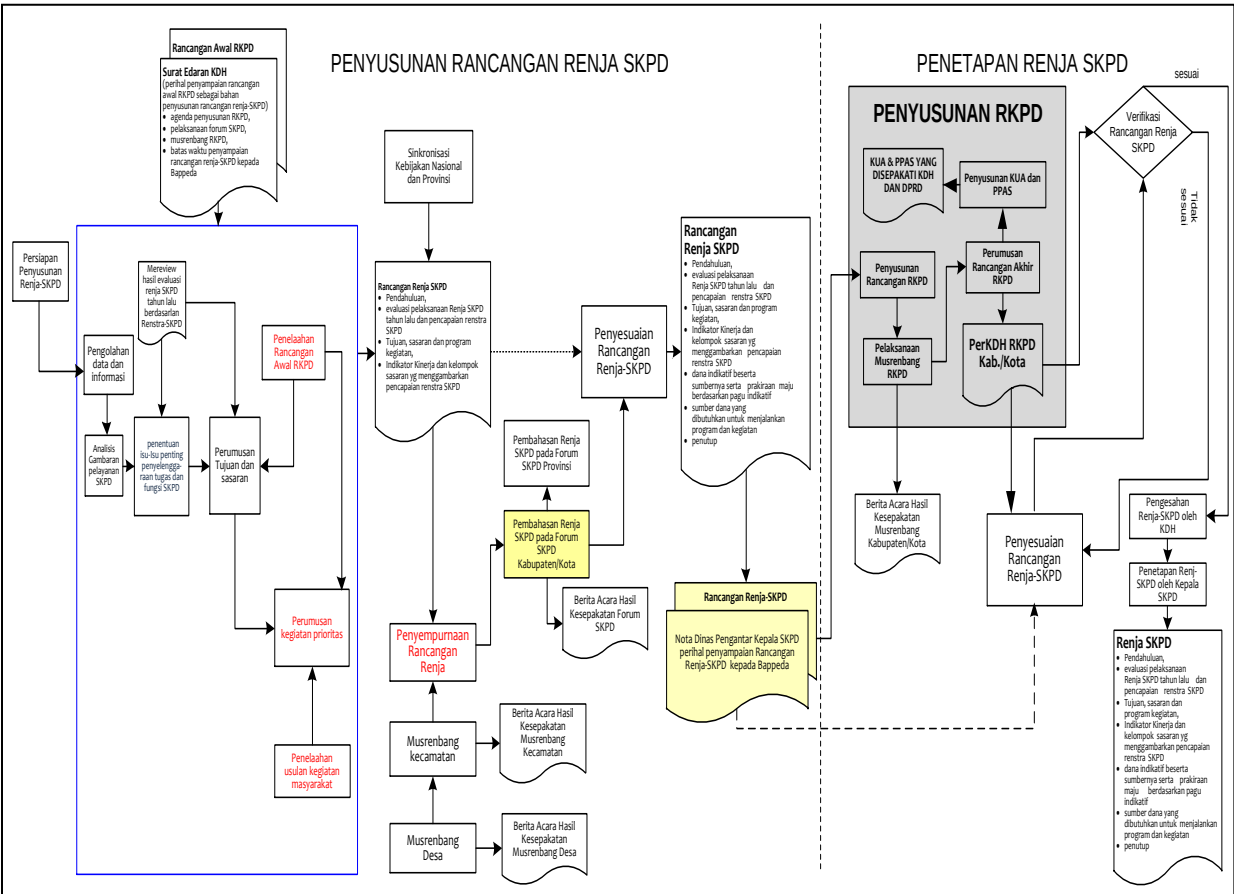
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020, antara lain :

- Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ;
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
25. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50).
27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpianng Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Noor 144);
28. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
29. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam penyusunan RKA Tahun 2025 serta panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 sebagai :

1. Perumusan program-program prioritas.
2. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh OPD.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pengukuran keberhasilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja OPD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja OPD.

BAB IV Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu OPD Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	010601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	95	4,969,035,982	20.25	1,297,808,884		0		0		0	20	1,297,808,884	21	26	SEKRETARIS (Dinas Sosial)
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.55									0			0		SEKRETARIS (Dinas Sosial)
2		010601201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
3		10601201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0								0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
4		10601201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- S K P D (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0								0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
5		10601201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0								0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
6		10601201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- S K P D (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0								0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

7		10601201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
8		10601201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
9		10601201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P.erencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
10		10601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4,142,265,858	25	1,164,190,964	0	0	0	25	1,164,190,964	25	28			Sub Koordinator Keuangan
11		10601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	36	4,142,265,858	36	1,164,190,964						36	1164190964	10	28	Sub Koordinator Keuangan
12		10601202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	8	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan
13		10601202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan K e u a n g a n Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	9	0	0							0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator Keuangan
14		10601203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15		10601203002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0								0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16		10601203005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	0								0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17		010601205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	42,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	2	42,009,000								0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

		10601205005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	108	0								0	0	0	#DIV/0!	
19		10601205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	6	0								0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20		010601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	132,089,900	15.75	28,383,759	0	0	0	16	28,383,759	16	21			Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21		10601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
22		10601206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
23		10601206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
24		10601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	32,089,900	1	900,000					1	900000	50	3		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25		10601206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
26		10601206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
27		10601206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
28		10601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	100,000,000	1	27,483,759					1	27483759	25	27		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
29		10601206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
30		010601207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31		010601207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	40	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
32		010601207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	0							0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

33		010601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	423,803,744	25.00	76,745,081		0		0		0	25	76,745,081	25	18	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
34		010601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	90,000,000	1	9,444,457							1	9444457	25	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
35		010601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	0									0	0	0	#DIV/0!	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
36		010601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	333,803,744	1	67,300,624							1	67300624	25	20	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
37		010601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	228,867,480	25.00	28,489,080		0		0		0	25	28,489,080	25	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
38		10601209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	53,231,696	1	7,324,616							1	7324616	100	14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
39		10601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	19	125,086,784	7	21,164,464							7	21164464	37	17	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
40		10601209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	50,549,000									0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	10.658	26.118	
PREDIKAT KINERJA																			
41	-	010602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)	85.57	1,079,782,032	23.50	191,963,672		0		0		0	24	191,963,672	27	18	B i d a n g Pemberdayaan Sosial
42		010602202	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	90	0	0	0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat

43		010602202001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	50	0								0	0	0	#DIV/0!	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat	
44		010602203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	80.07	1,079,782,032	25.00	191,963,672		0		0		0	25	191,963,672	31	18	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat
45		010602203001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	42	946,825,568	42	168,470,928						42	168470928	100	18	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat	
46		010602203002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	7	82,413,072	7	13,735,512						7	13735512	100	17	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:lembaga)	17	50,543,392	4	9,757,232						4	9757232	24	19		
47		010602203005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	7	0												Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n Kelembagaan Sosial, Perorangan, Keluarga d a n L e m b a g a Masyarakat	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	27.463	17.778	

PREDIKAT KINERJA																				
48	-	010604	P R O G R A M REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti (Dengan Satuan:%)	100	329,646,784	7.12	13,135,848		0		0		0	7	13,135,848	7	4	Bidang Rehabilitasi Sosial	
49		010604201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis (Dengan Satuan:%)	100	185,300,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
50		010604201001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	48,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
51		010604201002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	20,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
52		010604201003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	48,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
53		010604201004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	12,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
54		010604201005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	15	11,700,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
55		010604201006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan P e n g e m i s d a n Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	15	15,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	

56		010604201007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	2,500,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
57		010604201008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	2,500,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
58		010604201009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	2,400,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
59		010604201010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	12,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
60		010604201011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	4,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
61		010604201012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	7,200,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
62		010604202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial (Dengan Satuan:%)	100	144,346,784	15.25	13,135,848		0	0	0	15	13,135,848	15	9	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids		
63		010604202001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0													Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids

64		010604202002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	29,760,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
65		010604202012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	99,586,784	6	13,135,848							6	13135848	20	13	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
66		010604202014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	15,000,000									0	0	0	0	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Hiv/Aids
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	7.120	3.985	
PREDIKAT KINERJA																			
67	-	010605	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	100	0	0												Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial
68		010605202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	0	0												Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
69		010605202001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	3,000	0													Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
70		010605202002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	260	0													Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin

71		010605202003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	100	0												Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	
72		010605202004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	0												Sub Koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			
PREDIKAT KINERJA																			
73	-	010606	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota (Dengan Satuan:%)	100	678,095,704	15.25	106,808,168		0		0	0	15	106,808,168	15	16	Bidang Penanganan Bencana	
74		010606201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. (Dengan Satuan:%)	100	51,675,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
75		010606201001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	537	20,000,000								0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
76		010606201002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	537	21,248,000								0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
77		010606201003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	135	7,200,000								0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
78		010606201004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	135	2,327,000								0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	

79		010606201005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	537	900,000								0	0	0	0	Dinas Sosial	
80		010606202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK) (Dengan Satuan:%)	100	626,420,704	40.57	106,808,168		0		0		0	41	106,808,168	41	17	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
81		010606202001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kampung)	4	0													Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
82		010606202002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	626,420,704	50	106,808,168						50	106808168	100	17		Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	15.250	15.751	
PREDIKAT KINERJA																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	15.123	15.908	
PREDIKAT KINERJA																			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PPKS dan penanganan bencana;
2. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar;
3. Keterbatasan infrastruktur sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PPKS;
5. Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai penunjang SDM bidang sosial yang menangani langsung permasalahan sosial di masyarakat;
6. Sinkronisasi dan pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Basis Data Terpadu/BDT) dengan data sektoral penerima bantuan dan data PPKS belum maksimal dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* dan *exclusion error* ;
7. Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan ekonomi penduduk miskin dan rentan, baik dari sisi kesempatan berusaha maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan;
8. Dukungan kebijakan alokasi anggaran dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum memadai;

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Sosial untuk tahun 2025 secara umum berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, di antaranya sebagai berikut :

1. Masih berfluktuasinya tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang dengan rentang indikator Persentase Penduduk Miskin di tahun 2020 sebesar 4,36 %, Tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 4,76 % dan sedikit menurun Tahun 2022 sebesar 4,55 % dari populasi jumlah penduduk yang terus meningkat;
2. Ketersediaan database PPKS yang belum memadai;
3. Masih maraknya gelandangan dan pengemis yang memenuhi jalanan kota;
4. Belum memadainya sarana/prasarana rumah singgah/ penampungan sementara yang representatif;
5. Kerjasama, koordinasi dan sinergisitas antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, lintas sektoral untuk penanganan gelandangan dan pengemis belum efektif dan terintegrasi dengan baik.
6. Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel) yang memperoleh pelayanan dasar dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK;
7. Aksesibilitas bagi ODK/Penyandang Disabilitas di luar panti;
8. Belum optimalnya pengembangan potensi dan pemberdayaan orang dengan kecacatan (ODK)/Penyandang Disabilitas (difabel).
9. Masih merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial masyarakat di wilayah perkotaan;
10. Sarana dan prasarana pelayanan sosial yang belum memadai.
11. Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam, kondisi geografis perkotaan, faktor ketidaksengajaan/ kecelakaan seperti banjir, puting beliung, gelombang pasang, kebakaran dan lain sebagainya;
12. Potensi konflik sosial/keresahan sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar belakang ekonomi, budaya, sosial dan politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2024 dengan hasil analisa kebutuhan pada Renja 2024, adapun review terhadap Rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kota pangkalpinang

Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Da
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,963,723,416	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5,963,723,416
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	22,680,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	22,680,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	900,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	900,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	420,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	420,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,260,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	210,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	210,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,270,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6,270,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,360,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12,360,000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	4,469,778,993	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	4,469,778,993
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	4,454,638,993	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org/Bln	4,454,638,993
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	10,060,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	10,060,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	5,080,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	5,080,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100 %	3,960,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100 %	3,960,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,800,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,800,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	2,160,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	2,160,000

			Barang Milik Daerah pada SKPD			SKPD		Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	69,439,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	69,439,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta sribut kelengkapan	2 Paket	42,009,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta sribut kelengkapan	2 Paket	42,009,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108 Dokumen	2,430,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108 Dokumen	2,430,000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pk. Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25,000,000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pk. Pinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	295,258,423	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	295,258,423
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,682,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,682,500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,268,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,268,500
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	72,459,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	2 Paket	72,459,900

			Disediakan					Disediakan		
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,686,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26,686,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,000,000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,540,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,540,000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	132,021,523	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	132,021,523
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8,600,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	158,758,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	158,758,000
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit	97,159,000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Unit	97,159,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	61,599,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	61,599,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	538,550,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	538,550,000

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	96,000,000
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22,550,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22,550,000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	405,299,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	405,299,000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,750,000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	215,000,000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,549,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,549,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pk. Pinang	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85,57%	757,707,504	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pk. Pinang	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85,57%	757,707,504

	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90%	32,719,000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90 %	32,719,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	32,719,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	50 Dokumen	32,719,000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	80,07 %	724.988.504	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	80,07 %	724.988.504
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	543,662,432	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	543,662,432
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	87,413,072	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	87,413,072

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pk. Pinang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	59,174,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pk. Pinang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Sertifikat	59,174,000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pk. Pinang			453,387,392	Program Rehabilitasi Sosial	Pk. Pinang			453,387,392
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar; Anak Terlantar; Lanjut Usia Terlantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	360.374.392	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar; Anak Terlantar; Lanjut Usia Terlantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	360.374.392
	Penyediaan Permakanan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157,350,000	Penyediaan Permakanan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	157,350,000
	Penyediaan Sandang	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,500,000	Penyediaan Sandang	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	25,500,000

	Penyediaan Alat Bantu	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13,200,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	10,750,000
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pk. Pinang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	12,500,000

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2,500,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	2,500,000
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	2,500,000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2,500,000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4,000,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4,000,000
	Pemberian Layanan Rujukan	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Pk. Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	46,000,000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	100 %	93.013.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pk. Pinang	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	93.013.000

			sosial					sosial		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,513,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,513,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7,500,000
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15,000,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15,000,000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pk. Pinang	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	562.040.000	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pk. Pinang	Persentase anak terlantar yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	562.040.000

	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Anak-Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pemeliharaan di Daerah Kewenangan Kabupaten/kota	0%	0	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Anak-Anak Terlantar Yang Mendapatkan Pemeliharaan di Daerah Kewenangan Kabupaten/kota	0%	0
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0
	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	562.040.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	562.040.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	39,880,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000 Orang	39,880,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	260 Keluarga	376,600,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	260 Keluarga	376,600,000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pk Pinang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	100 Keluarga	65,180,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pk Pinang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	100 Keluarga	65,180,000

			Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pk Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.380,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pk Pinang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	80.380,000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				403.685.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				403.685.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	251.685.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	251.685.000
	Penyediaan Makanan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	100,000,000	Penyediaan Makanan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	100,000,000
	Penyediaan Sandang	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	62,310,000	Penyediaan Sandang	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	62,310,000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pk Pinang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	135 Unit	51,550,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Pk Pinang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	135 Unit	51,550,000

			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	22,825,000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	22,825,000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pk Pinang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	15,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pk Pinang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	537 Orang	15,000,000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %	152.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pk Pinang	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	100 %	152.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	12,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	12,000,000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	140,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pk Pinang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	140,000,000

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan data dan informasi setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Penyiapan daftar isi dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025
- b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
- c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD. Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya .

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Sosial telah menyiapkan rancangan rencana kerja perubahan tahun 2025 seperti tabel berikut.

Rencana Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
 Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
 Tahun 2025

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Pagu Perubahan Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	
		Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	4.48	7,242,195,888	KADINSOS
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.55	5,190,243,688	SEKDIN
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	95		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	5,484,000	Sub Koord PEP
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,957,000	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,400,000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	2,127,000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	%	100	4,469,778,993	Sub. Koord. Keuangan
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	36	4,289,207,904	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	%	100	89.209.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	89,209,000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	176,354,260	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3,299,000	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	5,872,160	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	36,783,100	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	12,400,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	118,000,000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	389,121,044	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	90,000,000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	11,550,000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	287,571,044	

1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	240,867,480	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	63,231,696	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	19	127,086,784	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50,549,000	
		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1,086,782,032	KADINSOS
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	%	85.57	1,086,782,032	KABID. DAYASOS
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	%	65.12	1,086,782,032	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	42	953,825,568	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	82,413,072	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	17	50,543,392	
		Capaian SPM Sosial	%	100	177,700,000	KADINSOS
		Persentase PPKS yang tertangani	%	86.83	297,375,088	KADINSOS
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasar nya diluar panti	%	100	177,700,000	
		Persentase PPKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	100	119,675,088	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	453.387.392	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	48,000,000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	20,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	48,000,000	

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	12,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	11,700,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15	7,400,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	2,500,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	2,500,000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	2,400,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	12,000,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	4,000,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	7,200,000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	%	100	119,675,088	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	29,760,000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				2,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	77,315,088	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10,600,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	562.040.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin yang Terkelola Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	562.040.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	3,000	30,000,000	

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	%	100	637,795,080	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	51,675,000	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	20,000,000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	21,248,000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	135	7,200.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	135	2,327,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	537	900,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Melalui Tagana Masuk Kelurahan (TMK)	%	100	586,120,080	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	586,120,080	
TOTAL :					7,242,195,888	

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang dan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan perubahan rencana kerja yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Sosial Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2025. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Pangkalpinang, 03 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang



Khotaman Barka, S.STP.,M.Tr.IP

NIP. 198302102001121002